BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Angkutan umum penumpang merupakan penyedia jasa angkutan umum yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kenyamanan, kemudahan, dan rasa aman kepada pengguna jasa angkutan umum di dalam melakukan operasi perjalanan. Dengan demikian untuk membahas suatu angkutan umum, tidak terlepas dari tersedianya fasilitas angkutan umum dan juga pengguna jasa angkutan untuk melakukan dari satu tempat ke berbagai arah tujuannya. Adapun angkutan umum merupakan sebuah fasilitas untuk menunjang penumpang dari jalur angkutan umum dari berbagai jenis rute (Mutiawati, 2019). Angkutan umum yang beroperasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah akan menggunakan angkutan umum, yang beroperasi tersebut untuk menunjang kegiatan sehari-hari sehingga jasa angkutan umum ini dapat dirasakan pentingnya keberadaannya. Selain itu juga angkutan umum harus direncanakan, diatur, ditata dan dikoordinasikan sebaik-baiknya sehingga pelayanan angkutan umum yang beroperasi bisa menjangkau semua daerah yang ada, khususnya wilayah di daerah sekitar tersebut (Frans et al., 2016).

Angkutan desa yang semula beroperasi secara umum di Kabupaten Karangasem mengalami pergeseran menjadi angkutan sewa atau angkutan carter. Hal ini diakibatkan oleh mulainya perkembangan secara ekonomi, terdapat permintaan akan angkutan yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu atau kelompok tertentu. Hal ini mendorong para pemilik angkutan desa untuk beralih menjadi penyedia jasa angkutan sewa atau carter, yang menawarkan layanan yang lebih personal dan dapat diatur sesuai permintaan konsumen. Dari hasil eksisting, angkutan desa di Kabupaten Karangasem memiliki tarif yang sangat tinggi. Tarif yang diberikan oleh pengemudi atau pemilik angkutan pedesaan yaitu sesuai dengan jarak rutennya, dengan harga bervariasi mulai Rp. 5000 – Rp 50.000. Peningkatan

tarif angkutan desa ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk biaya operasional yang tinggi dan ketersediaan bensin yang terbatas di daerah terpencil. Akibatnya, bagi sebagian masyarakat desa, terutama mereka yang memiliki akses ke kendaraan pribadi, menggunakan angkutan desa dengan tarif yang tinggi tidak lagi menjadi pilihan yang ekonomis. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak memiliki kepercayaan lagi terhadap angkutan desa dan memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi mereka sendiri daripada bergantung pada angkutan desa.

Sepinya minat masyarakat untuk menaiki angkutan pedesaan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi sopir atau pemilik angkutan desa. Dengan penurunan jumlah penumpang yang cukup mencolok, para sopir atau pemilik angkutan desa akan menghadapi berbagai kerugian. Dengan demikian, sepihnya minat masyarakat untuk menaiki angkutan pedesaan bukan hanya mengakibatkan kerugian finansial bagi sopir atau pemilik angkutan desa, tetapi juga memberikan dampak yang luas pada aspek sosial dan emosional kehidupan mereka. Hal ini menekankan pentingnya untuk mencari solusi yang berkelanjutan untuk mendukung keberlangsungan angkutan desa dan kesejahteraan para pelakunya (Kambuaya, 2021). Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian kembali untuk mengubah angkutan sewa atau carter menjadi angkutan pedesaan sesuai dengan kaidahnya serta dengan tarif yang semestinya.

Untuk dapat menghasilkan suatu penyedia jasa menjadi salah satu penyedia jasa yang baik dan benar, dalam hal ini jasa angkutan umum, dibutuhkan pemikiran yang cermat mengenai cara dan strategi pelayanan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menentukan tarif yang sesuai. Penentuan tarif dalam sistem transportasi umum memiliki beberapa tujuan yang penting. Pertama, tujuan utamanya adalah untuk menjaga keseimbangan antara biaya operasional sistem transportasi dengan pendapatan yang diperoleh dari penumpang. Dengan menetapkan tarif yang sesuai, operator transportasi dapat memastikan bahwa pendapatan yang

diperoleh cukup untuk menutup biaya operasional, termasuk pemeliharaan, pengelolaan, dan pembangunan infrastruktur.

Salah satu upaya yang diantisipasi dalam menentukan tarif angkutan umum di masa depan adalah dengan menggunakan proyeksi demand. Proyeksi demand ini melibatkan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi perilaku perjalanan masyarakat, seperti pertumbuhan populasi, perubahan pola pekerjaan, perkembangan ekonomi, dan kemajuan teknologi (Rahman, 2012). Dengan proyeksi demand yang akurat, operator transportasi dapat menyesuaikan tarif sesuai dengan tingkat permintaan yang diharapkan. Misalnya, mereka dapat menyesuaikan tarif pada jam sibuk atau jalur yang paling sering digunakan untuk mencerminkan tingkat permintaan yang tinggi, sementara pada jam-jam atau jalur yang kurang ramai, tarif dapat disesuaikan untuk mendorong penggunaan dengan memberikan insentif harga yang lebih rendah. Selain itu, proyeksi demand juga dapat membantu operator transportasi untuk merencanakan penggunaan sumber daya dengan lebih efisien. Dengan memahami pola permintaan yang diantisipasi, mereka dapat menyesuaikan penawaran layanan, seperti menambah frekuensi perjalanan atau mengalokasikan kendaraan tambahan pada waktu-waktu tertentu dan di jalur-jalur tertentu yang diperkirakan akan mengalami lonjakan permintaan.

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait penerapan proyeksi demand untuk menentukan tarif pada angkutan umum. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Penentuan Tarif Berdasarkan Proyeksi Demand Angkutan Pedesaan Di Kabupaten Karangasem”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di lapangan, maka didapat identifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan antara tarif untuk penumpang umum yang saat ini berlaku di lapangan dengan tarif yang ditetapkan pemerintah.
2. Belum tepatnya terkait penetapan tarif yang sepihak dari sisi operator dan pengguna jasa.
3. Belum sesuai tarif angkutan pedesaan dengan kemauan pengguna jasa, sehingga menyebabkan menurunnya minat masyarakat dalam penggunaan angkutan pedesaan.
4. Tarif yang berlaku saat ini masih terhitung tinggi dan belum bisa menutupi Biaya Operasional Kendaraan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana persebaran *demand actual* dan *demand potential* angkutan pedesaan di Kabupaten Karangasem?
2. Bagaimana menghitung tarif menggunakan metode BOK serta perbandingan dari sisi pengguna jasa berdasarkan Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP)?
3. Bagaimana rekomendasi tarif yang dapat diterapkan pada angkutan pedesaan di Kabupaten Karangasem?
4. Apakah pelayanan angkutan pedesaan di Kabupaten Karangasem dengan tarif yang sesuai berdasarkan BOK, ATP, dan WTP memerlukan subsidi?

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kembali angkutan pedesaan di Kabupaten Karangasem serta menentukan tarif yang sesuai.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui persebaran *demand actual* dan *demand potential* angkutan pedesaan Kabupaten Karangasem.
2. Menghitung tarif angkutan pedesaan menggunakan metode BOK dan yang diinginkan oleh penumpang (pengguna jasa) dengan menggunakan analisis Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP).
3. Merekomendasikan usulan tarif yang sesuai dari segi operator dan pengguna jasa dan membandingkan dengan tarif eksisting di lapangan.
4. Menganalisis perhitungan subsidi pada angkutan pedesaan di Kabupaten Karangasem.

1.5 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan terhadap angkutan pedesaan yang masih aktif beroperasi sesuai trayek di wilayah studi Kabupaten Karangasem.
2. Penelitian dilakukan dengan menggunakan proyeksi demand, menghitung Biaya Operasional Kendaraan (BOK) angkutan perkotaan, perhitungan tarif berdasarkan kemampuan untuk membayar (*Ability to Pay*), dan berdasarkan kemauan untuk membayar (*Willingness to Pay*).